



JURNAL SAJARATUN

KEBIJAKAN MODERNISASI RAJA CHULALONGKORN (RAMA V) DAN DAMPAKNYA BAGI NEGARA THAILAND

¹Hasti Sulaiman

¹Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Flores

hastiariswan@gmail.com

Abstrak

Abstrak

Raja Chulalongkorn adalah awal pada pertengahan tahun 1880-an melakukan perubahan dalam struktur pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh raja Chulalongkorn terhadap negara Thailand, Faktor Pendorong Raja Chulalongkorn untuk Mengadopsi Kebijakan Modernisasi . Dampak kebijakan Modernisasi Raja Chulalongkorn Terhadap Transformasi Sosial dan Politik Negara (Siam) Thailand. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Raja Chulalongkorn adalah awal pada pertengahan tahun 1880-an ia mulai secara bertahap menempatkan adminisator yang kompeten dan terpercaya, yang memungkinkannya untuk melaksanakan reformasi besar-besaran secara lebih efektif. Puncaknya adalah pembentukan 12 kementerian. Salah satu pencapaiannya yang paling terkenal adalah penghapusan perbudakan secara bertahap. Reformasi Administrasi dan Pemerintahan: Ia merombak sistem administrasi feodal yang lama dengan model pemerintahan sentral yang lebih moderen dan efisien. Sistem hukum tradisional digantikan dengan sistem hukum yang lebih moderen, terinspirasi oleh model Barat. Pengadilan-pengadilan baru didirikan, dan undang-undang baru diberlakukan, pembangunan Infrastruktur: Pemerintahannya mendorong pembangunan infrastruktur vital seperti jaringan kereta api pertama, jalan raya, layanan pos dan telegraf, serta rumah sakit dan sekolah moderen. Pembangunan ini sangat penting untuk integrasi nasional dan pertumbuhan ekonomi, reformasi Pendidikan: Raja Chulalongkorn sangat kebijakan modernisasi adalah Ancaman Kolonialisme Eropa, Pendidikan Barat dan Keterbukaan menekankan pentingnya pendidikan. Ia mendirikan sekolah-sekolah moderen, termasuk sekolah untuk anak perempuan dan sekolah kejuruan. Ia juga mengirim banyak pelajar Siam untuk menuntut ilmu di Eropa. Upaya ini melahirkan generasi baru pejabat dan intelektual yang terdidik, reformasi Keuangan dan Fisikal: Sistem perpajakan direformasi untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi korupsi. Sebuah sistem anggaran nasional diperkenalkan, modernisasi Militer. Angkatan bersenjata dimodernisasi dengan pelatihan dan persenjataan model Barat untuk memperkuat pertahanan negara. Faktor-faktor yang pendorong Raja Chulalongkorn mengadopsi Pemikiran dan kebijakan diplomasi yang cerdas. Dampa kebijakan Raja Chulalongkor adalah dampak sosial dan politik.

Abstract

King Chulalongkorn was the beginning in the mid-1880s to make changes in the government structure. The purpose of this study is to determine the policies carried out by King Chulalongkorn towards Thailand, the Driving Factors of King Chulalongkorn to Adopt Modernization Policies. The Impact of King Chulalongkorn's Modernization Policy on the Social and Political Transformation of the State (Siam) of

Article Info

Naskah diterima: 1 Januari 2025,

Naskah direvisi: 3 Maret 2025,

Naskah disetujui: 30 Juni 2025

Keywords:

Kebijakan
Modernisasi
Raja Chulalongkorn
Thailand

Thailand. This research method uses library research methods. The results of this study indicate that the policies carried out by King Chulalongkorn were the beginning in the mid-1880s he began to gradually place competent and trusted administrators, which enabled him to carry out large-scale reforms more effectively. The culmination was the formation of 12 ministries. One of his most famous achievements was the gradual abolition of slavery. Administrative and Government Reform: He overhauled the old feudal administrative system with a more modern and efficient central government model. The traditional legal system was replaced with a more modern legal system, inspired by the Western model. New courts were established, and new laws were enacted. Infrastructure development: His government encouraged the development of vital infrastructure such as the first railway network, highways, postal and telegraph services, and modern hospitals and schools. These developments were crucial for national integration and economic growth. Educational reform: King Chulalongkorn's modernization policies emphasized the importance of education. He established modern schools, including schools for girls and vocational schools. He also sent many Samese students to study in Europe. These efforts produced a new generation of educated officials and intellectuals. Financial and Fiscal reform: The tax system was reformed to increase state revenues and reduce corruption. A national budget system was introduced. Military modernization: The armed forces were modernized with Western-style training and weaponry to strengthen the nation's defense. Factors that drove King Chulalongkorn to adopt intelligent diplomatic thinking and policies. The impact of King Chulalongkorn's policies was social and political.

© 2025 Publikasi Pendidikan Sejarah Uniflor

PENDAHULUAN

Negara Thailand merupakan salah satu negara yang berada pada region Asia Tenggara. Sebelah daerah Indo-China hingga sebagian semenanjung Malaya. Secara astronomis, Thailand terletak di antara 5° hingga 21° LU dan 97° hingga 106° BT. Secara geografis, batas wilayah negara Thailand sebelah utara adalah Myanmar dan Laos, sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Sam, sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Teluk Thailand, lalu sebelah barat berbatasan dengan Myanmar serta Laut Andaman. (M. C. Ricklef dkk, 2013).

Ibu kota negara Thailand adalah Bangkok, bentuk pemerintahan Thailand saat ini adalah monarki konstitusional, sehingga posisi kepala negara dipegang oleh seorang raja, sedangkan kepala pemerintahan berada di bawah kendali perdana menteri. Negara Thailand memiliki sejarah yang panjang dan kaya bermula dari kerajaan-kerajaan kuno hingga menjadi monarki konstitusional seperti sekarang ini.

Menjelang akhir abad ke-19, era penjajahan Eropa mencapai puncaknya di Asia Tenggara. Sebagian besar wilayah telah jatuh ke dalam cengkeraman kekuatan Barat, dengan Inggris menguasai Burma dan Malaya di sebelah barat dan selatan, serta Prancis yang menguasai Indochina (Vietnam, Kamboja, dan Laos) di sebelah timur.

Negara Thailand, (Sam) adalah unik di antara negara Asia Tenggara, Sam/Thailand sampai pada zaman modern secara resmi tidak pernah dijajah oleh kekuasaan Eropa. Sedangkan Asia Tenggara lainnya berada di bawah kekuasaan kolonial. Thailand (Sam nama saat itu) tetap tidak ditaklukan. Tidak pernah dibawah dominasi kekuasaan bangsa Barat. Beberapa faktor penyebab negara Thailand tidak dijajah oleh kolonialisme Eropa adalah Thailand sebagai buffer state artinya negara Thailand berada di antara wilayah pengaruh Inggris dan Prancis, sehingga menjadi negara penyangga yang memicu persaingan dan mencegah salah satu negara Barat untuk menguasai seluruh wilayah, faktor lain yang tidak kalah penting dari keberhasilan yang luar biasa ini terletak pada tujuan dan kepemimpinan seorang raja yang progresif dan strategis yaitu Raja Chulalongkorn, yang juga dikenal dengan nama anumerta Rama V. Bertakhta dari tahun 1868 hingga 1910, Raja Chulalongkorn menyadari bahwa ancaman imperialisme Barat adalah nyata (Sudharmono, 2012). Raja Chulalongkorn memahami bahwa cara terbaik untuk mempertahankan kedaulatan Sam adalah bukan dengan perlawanan militer secara langsung, melainkan dengan melakukan modernisasi besar-besaran dari dalam. Strateginya adalah mengadopsi sistem, administrasi, dan teknologi Barat secara selektif untuk memperkuat bangsanya, sehingga Sam

dapat bernegosiasi dan berhadapan dengan bangsa Eropa sebagai negara yang setara dan beradab menurut standar mereka. (Sudharmono, 2012). Maka, dimulailah sebuah era reformasi transformatif yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan negara. Mulai dari perombakan birokrasi pemerintahan yang terpusat, modernisasi militer, reformasi sistem pendidikan dan hukum, pembangunan infrastruktur yang meliputi kereta api dan telegraf, hingga kebijakan sosial yang paling signifikan yaitu penghapusan perbudakan secara bertahap. Kebijakan-kebijakan tersebut, yang secara kolektif dikenal sebagai "Reformasi Chulalongkorn", dirancang untuk mengubah Siam dari kerajaan feodal tradisional menjadi sebuah negara-bangsa (nation-state) yang modern.

Kebijakan yang revolusioner ini tidak hanya berhasil menjadi tameng yang melindungi Siam dari kekuasaan kolonialisme, tetapi juga secara fundamental meletakkan dasar yang kokoh bagi lahirnya negara Thailand moderen. Artikel ini akan mengupas lebih dalam mengenai berbagai kebijakan modernisasi yang digagas oleh Raja Chulalongkorn, serta menganalisis dampak signifikan yang ditimbulkannya bagi perjalanan sejarah, struktur sosial, dan perkembangan Thailand hingga saat ini.

Awal mula proses modernisasi negara Siam/Thailand bermula dari ayahnya yaitu raja Mongkut (Rama V), yang merupakan perintis pelaksanaan Pendidikan Barat. Raja Mongkut memainkan peran penting dalam memperkenalkan pendidikan moderen ke dalam pendidikan tradisional Siam/Thailand. Ini merupakan langkah awal yang sangat signifikan dalam proses modernisasi negara Siam/Thailand. Masa Pemerintahan raja Chulalongkorn (1868-1910) merupakan titik balik yang sangat penting sejarah modernisasi negara Siam/Thailand. Raja Chulalongkorn melakukan pembaharuan secara besar-besaran dalam sistem pemerintahan, menghapus kekuasaan raja-raja lokal dan mengentralisasi pemerintahan. (Fauziah et al., 2025).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka (Mahmud, 2021). Studi

literatur merupakan metode yang digunakan agar dapat mengumpulkan sumber dari data-data serta pola pengungkapan sebagai bahan pemaparan dalam penulisan artikel ini. Studi literatur yang dilakukan yang dilakukan ini juga melalui metode membaca dan mempelajari berbagai sumber buku bacaan baik itu dalam buku maupun jurnal-jurnal yang relevan yang bertujuan sebagai sumber utama yang berkaitan dengan suatu kajian sehingga dapat dilakukan analisis agar dapat memperoleh hasil ide, dan juga gagasan penulis. (Fauziah et al., 2025)

Senada dengan (Abdul Rahman Sholeh, 2005), penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. Demikian dengan Artikel Kebijakan modernisasi Raja Chulalongkorn (Rama V) dan dampaknya bagi negara Thailand mengumpulkan data dengan menggunakan data kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Raja Chulalongkorn

Chulalongkorn dengan nama lengkap Phra Bat Somdet Phra Poramintharamaha Chulalongkorn Phra Chunla Chom Klao Chao Yu Hua (rama V) lebih dikenal raja Culalongkorn, lahir pada 20 September 1853, di istana Agung Phra Nakhon, Siam. Pangeran Chulalongkorn adalah putra tertua Raja Mongkut (Rama IV) dan Ratu Debsirindra yang dikenal sebagai putri Ramphoei Sriwong, dari dinasti Chakri. Sejak usia muda, ia telah dipersiapkan untuk menjadi penerus takhta. Raja Mongkut, yang dikenal sebagai raja yang berpikiran maju dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan Barat, memastikan putranya menerima pendidikan yang menyeluruh. Oleh karena itu ia menyewa seorang guru privat berkebangsaan Inggris yaitu Anna Leonowens menjadi guru dalam keluarga kerajaan selama 6 tahun (1862-1868).

Pendidikan yang diperoleh Chulalongkorn mencakup studi tradisional Siam seperti bahasa, sastra, dan agama Buddha, serta pendidikan moderen yang diajarkan oleh tutor-tutor Eropa, termasuk Anna Leonowens yang terkenal (meskipun perannya seringkali dilebih-lebihkan dalam catatan populer Barat). Ia mempelajari bahasa Inggris, ilmu politik,

administrasi publik, dan sains. Ayahnya juga sering melibatkannya dalam urusan negara dan membawanya dalam perjalanan ke berbagai daerah di Siam serta kunjungan ke negara tetangga seperti Singapura dan Jawa, untuk memperluas wawasannya.

2. Kebijakan Modernisasi yang Diterapkan oleh Raja Chulalongkorn di negara Siam/ Thailand

Modernisasi negara Thailand yang dilakukan oleh raja Chulalongkorn (Rama V) tidak terlepas dari peran raja Mongkut (Rama IV). Raja Mongkut (18 Oktober 1804 -1 Oktober 1868) adalah raja keempat (IV) Siam (Thailand) dari dinasti Chakri, bergelar Rama IV. Ia memerintah dari tahun 1851 hingga kematiannya pada tahun 1868. Modernisasi Thailand diawali oleh Raja Mongkut ayah dari Raja Chulalongkorn. Mongkut naik ke tahta sebagai Rama IV pada tahun 1851, bertekad untuk menyelamatkan Siam dari dominasi kolonial dengan memodernisasi mata pelajaran. Tapi meskipun ia dalam teori monarki mutlak, kuasanya terbatas. Setelah menjadi biarawan selama 27 tahun, ia tidak memiliki dasar yang kuat di antara pangeran kerajaan, dan tidak memiliki aparaturnya modern untuk melaksanakan keinginannya.

Usaha pertama reformasi, untuk membangun sistem administrasi modern dan meningkatkan status utang-budak dan perempuan yang sedang frustrasi.(Sudharmono, 2012). Dengan demikian, Rama IV menyambut tekanan barat di Siam. Usaha raja Mongkut dalam memodernisasikan Thailand adalah 1) Diplomasi dan membangun Hubungan Internasional, raja Mongkut membangun kekuatan barat karena raja Mongkut menyadari ancaman kolonialisme barat dan secara aktif berupaya menjalin hubungan baik dengan negara-negara seperti Inggris, Prancis dan Amerika Serikat. Pada tahun 1855 dalam bentuk sebuah misi yang dipimpin oleh Gubernur Hong Kong, Sir John Bowring, yang tiba di Bangkok dengan tuntutan untuk segera berubah, didukung oleh ancaman kekerasan. Sang Raja segera menyetujui permintaan kepada perjanjian baru, yang disebut Perjanjian Bowring, meskipun perjanjian ini memberikan keuntungan lebih kepada Inggris dalam hak perdagangan dan hak eksteritorial, tetapi raja Mongkut memandang sebagai cara untuk membuka Siam terhadap perdagangan internasional dan menekan tindakan yang lebih agresif dari kekuatan barat.

Kebijakan keseimbangan kekuatan raja Mongkut dengan cerdas memainkan kompetisi antara Inggris dan Perancis untuk memastikan kelangsungan hidup dan kemerdekaan Siam, 2) Reformasi internal dan modernisasi, Pendidikan, raja Mongkut sangat tertarik pada ilmu pengetahuan dan teknologi barat. Raja Mongkut mendorong studi bahasa Inggris dan ilmu- ilmu moderen di kalangan elit Siam. Ia bahkan memperjuangkan guru-guru barat untuk mendidik putranya yaitu Raja Chulalongkorn, raja Mongkut memperkenalkan gagasan-gagasan administrasi moderen, meskipun reformasi birokrasi yang berarti baru terjadi pada masa putranya Raja Chulalongkorn, tetapi raja Mongkut yang meletakkan dasar dengan menunjuk penasihat-penasihat barat di berbagai bidang.

Demikian dengan bidang sosial dan budaya raja Mongkut memperkenalkan pakaian barat di istana sebagai lambang modernitas, ia juga mendorong studi geografi dan astronomi moderen. Militer raja Mongkut menyadari perlu adanya modernisasi militer untuk menghadapi potensi ancaman dari luar, ia mulai memperkenalkan teknologi dan latihan militer, 3) Reformasi Agama Budha, gerakan Dhammayuttika Nikaya. Sebelum naik tahta, raja Mongkut pernah menjadi seorang biksu selama 27 tahun. Raja Mongkut mempelopori gerakan reformasi dalam Sangha Thailand. Raja Mongkut menekankan pada disiplin monastik yang lebih ketat dan kembali pada ajaran Budha Pali yang lebih awal, dan menjauhi praktik-praktik sinkretis dan takhayul yang telah menyusap kedalam agama Budha Siam.

Raja Mongkut memaksimalkan dan secara aktif membina persahabatan dengan para misionaris Katolik dan Protestan dari berbagai bangsa, menguasai bahasa Inggris dan latin, menguasai bahasa beberapa bahasa asia lainnya. Ia mengembangkan potensi intelektual yang sangat kuat terhadap ide dan kebudayaan Barat. Setiap langkah diplomatik yang diambil Raja Mongkut selalu didasarkan pada kepentingan nasional Thailand. Raja Mongkut memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil akan menguntungkan Thailand dalam jangka panjang, baik dari segi ekonomi maupun politik. Keberhasilannya dalam menjaga netralitas Thailand di tengah persaingan global yang rumit adalah salah satu faktor kunci yang membantu negara Thailand mempertahankan kemerdekaannya pada masa itu.

Kebijakan diplomatis dan pendekatan bijaksana Raja Mongkut melahirkan dampak jangka panjang bagi Thailand. Selama masa pemerintahan raja Mongkut, kekuasaan Wangsa Bunnag mencapai puncaknya: Wangsa ini menjadi keluarga bangsawan paling berkuasa di Siam pada masa itu.

Raja Mongkut meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1868. Penyebab utama kematiannya adalah penyakit malaria yang dideritanya. Meninggalnya Raja Mongkut berawal dari sebuah ekspedisi ilmiah yang dipimpinnya sendiri. Raja, yang dikenal mempunyai minat terhadap ilmu pengetahuan dan astronomi, melakukan perjalanan ke desa Sam Roi Yot di Provinsi Prachuap Khiri Khan untuk melihat gerhana matahari total. Peristiwa alam ini diramalkan akan terlihat jelas dari lokasi tersebut pada tanggal 18 Agustus 1868. Dalam perjalanan tersebut, Raja Mongkut turut didampingi oleh putranya, Pangeran Chulalongkorn (calon Raja Rama V), serta sejumlah pejabat kerajaan dan tamu asing. Ternyata, lokasi pengamatan gerhana tersebut merupakan daerah yang diketahui sebagai sarang nyamuk malaria. Sekembalinya dari ekspedisi, Raja Mongkut dan Pangeran Chulalongkorn jatuh sakit akibat terjangkit malaria. Keadaan kesehatan Raja Mongkut menurun drastis.

Meskipun telah mendapatkan perawatan, sang raja tidak berhasil pulih dan akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di istana di Bangkok, sekitar enam minggu setelah ekspedisi tersebut. Sementara itu, Pangeran Chulalongkorn, meskipun juga menderita malaria parah, berhasil selamat dan kemudian naik takhta menggantikan ayahnya. Meninggalnya Raja Mongkut akibat malaria menjadi sebuah ironi, mengingat ia adalah seorang yang progresif dan berupaya memodernisasi Siam dengan memperkenalkan ilmu pengetahuan Barat raja. Perjalanan ilmiah yang seharusnya menjadi salah satu pencapaiannya justru berujung pada akhir hayat raja Mongkut. Setelah wafatnya raja Mongkut proses peralihan tahta Kerajaan Siam (kini Thailand) segera berjalan. Pengganti yang diangkat adalah putra sulung sang raja, yaitu Pangeran Chulalongkorn.

Setelah Raja Mongkut wafat pada 1 Oktober 1868 akibat malaria, Pangeran Chulalongkorn baru berusia 15 tahun dinobatkan menjadi raja Siam. Sesuai tradisi dan karena usianya yang masih muda, ia naik tahta sebagai Raja Rama V (1868-1873),

namun pemerintahan dijalankan oleh sebuah Dewan Perwalian. Tokoh yang paling dominan dalam dewan ini adalah Chao Phraya Si Suriyawongse (Chuang Bunnag), seorang bangsawan senior yang kuat dan berpengaruh. Selama masa perwalian ini, Chulalongkorn terus belajar dan mengamati jalannya pemerintahan. Ia juga memanfaatkan waktu ini untuk melakukan perjalanan keluar negeri, termasuk kunjungan ke India dan Mesir, yang semakin membuka matanya terhadap kemajuan di negara lain dan memperkuat tekadnya untuk memodernisasi Siam.

Raja Chulalongkorn secara resmi mengambil alih kendali penuh pemerintahan pada tahun 1873 setelah mencapai usia 20 tahun dengan penobatan keduanya (coronation). Meskipun demikian pada awal masa kekuasaan penuh Chulalongkorn masih menghadapi tantangan dari fraksi-fraksi konservatif istana. Pada pertengahan tahun 1880-an ia mulai secara bertahap menempatkan adminisator yang kompeten dan terpercaya, yang memungkinkannya untuk melaksanakan reformasi besar-besaran secara lebih efektif. Puncaknya adalah pembentukan 12 kementerian yang meliputi; kementerian pertahanan (kolahom) bertanggung jawab atas urusan militer, kementerian luar negeri (krom tha/krasuang kan Tang Prathet) mengurus hubungan diplomatik, kementerian keuangan (krasuang Kan Khlang) mengelola pendapatan dan pengeluaran negara termasuk perpajakan, kementerian dalam negeri (Mahattai) mengawasi administrasi provinsi dan urusan internal, kementerian kehakiman (Krasuang Yuttiham) memperbaiki sistem hukum dan peradilan, kemeterian pendidikan (Krasuang Thammakan) membentuk sistem pendidikan moderen, kementerian pekerjaan umum (Krasuang Yothathikan) bertanggungjawab atas pembangunan infrastruktur seperti jalan, kereta api dan irigasi, kemeterian ibu kota (Nakhonban) mengurus urusan Bangkok dan wilayah sekitarnya, kementerian istana (Wang) mengelola urusan kerajaan dan Istana, kementerian Pertanian (Krasuang Kasettrathikan) mengawasi pertanian dan sumber daya alam, Kemeterian Cap kerajaan (Phrakhleng) mengurus segel dan dokumentasi resmi dan Kementerian Sekretariat Kerajaan (Samnak Ratchalekan) melayani sebagai sekertariat pribadi raja. Yang terorganisasi secara fungsional pada tahun 1892, menandai

reorganisasi besar dalam administrasi pemerintahan Siam.

Sejak saat itu, raja Chulalongkorn memulai serangkaian reformasi yang ambisius dan luas jangkauannya, yang menyentuh hampir setiap aspek kehidupan di Siam diantaranya Penghapusan Perbudakan: Salah satu pencapaiannya yang paling terkenal adalah penghapusan perbudakan secara bertahap. (D.G.E Hall, 1988). Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari gejolak sosial dan ekonomi, dimulai dengan Undang-Undang Anak Budak pada tahun 1874 dan diakhiri dengan penghapusan total pada tahun 1905. Reformasi Administrasi dan Pemerintahan: Ia merombak sistem administrasi feodal yang lama dengan model pemerintahan sentral yang lebih moderen dan efisien. Ia membentuk kabinet menteri, kementerian-kementerian dengan fungsi spesifik (seperti Kementerian Dalam Negeri, Keuangan, Pendidikan, dan Kehakiman), serta membagi negara menjadi provinsi-provinsi (*monthon*) yang dipimpin oleh gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Modernisasi Hukum dan Peradilan: Sistem hukum tradisional digantikan dengan sistem hukum yang lebih moderen, terinspirasi oleh model Barat. Pengadilan-pengadilan baru didirikan, dan undang-undang baru diberlakukan, pembangunan Infrastruktur: Pemerintahannya mendorong pembangunan infrastruktur vital seperti jaringan kereta api pertama, jalan raya, layanan pos dan telegraf, serta rumah sakit dan sekolah moderen. Pembangunan ini sangat penting untuk integrasi nasional dan pertumbuhan ekonomi, reformasi Pendidikan: Raja Chulalongkorn sangat menekankan pentingnya pendidikan. Ia mendirikan sekolah-sekolah moderen, termasuk sekolah untuk anak perempuan dan sekolah kejuruan. Ia juga mengirim banyak pelajar Siam untuk menuntut ilmu di Eropa. Upaya ini melahirkan generasi baru pejabat dan intelektual yang terdidik, reformasi Keuangan dan Fisikal: Sistem perpajakan direformasi untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi korupsi. Sebuah sistem anggaran nasional diperkenalkan, modernisasi Militer: Angkatan bersenjata dimodernisasi dengan pelatihan dan persenjataan model Barat untuk memperkuat pertahanan negara.

Di era ketika sebagian besar Asia Tenggara jatuh ke tangan kekuasaan kolonial Inggris dan

Prancis, Raja Chulalongkorn dengan cerdas memainkan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Siam. Ia melakukan beberapa kunjungan kenegaraan ke Eropa (dua kali, pada tahun 1897 dan 1907), bertemu dengan para pemimpin Eropa untuk membangun hubungan baik dan menunjukkan bahwa Siam adalah negara yang beradab dan progresif.

Meskipun Siam terpaksa menyerahkan beberapa wilayahnya kepada Inggris (di Semenanjung Malaya) dan Prancis (di Laos dan Kamboja) untuk menghindari konfrontasi langsung dan penjajahan total, strategi diplomasinya berhasil menjaga Siam sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah secara langsung oleh kekuatan Eropa. Pada masanya mengambil langkah logis berikutnya yaitu mengirim orang Siam ke luar negeri untuk bersekolah. Keistimewaan ini secara bertahap diperluas kepada anggota elite lainnya melalui beasiswa pemerintah. Sasaran kedua Chulalongkorn mendidik cukup banyak anggota keluarganya untuk pada akhirnya mencapai pemerintahan yg hampir sepenuhnya didominasi oleh para pangeran. Pada saudara-saudaranya Pangeran Chakkraphat, yang ia jadikan menteri keuangan, Pangeran Damrong, yang menyelenggarakan pemerintah interior dan pendidikan, dan saudara iparnya Pangeran Devrawongse, menteri luar negeri selama 38 tahun. Pada 1887 Devrawongse berkunjung ke Eropa untuk mempelajari sistem pemerintahan. Atas rekomendasinya, raja mendirikan Kabinet pemerintah, kantor audit dan departemen pendidikan. Semi-otonom Chiang Mai telah berakhir dan tentara mereorganisasi dan memodernisasi. Sepanjang abad ke-19, baik Prancis maupun Inggris mencoba menggunakan pengaruh mereka atas Thailand. Namun, usaha tersebut tidak berhasil.

Kerajaan Inggris dan Prancis mengambil paksa beberapa daerah perbatasan di Thailand, tetapi tidak pernah berhasil sepenuhnya mengendalikan negara atau sebagian besar wilayah di Thailand. Akhirnya, Inggris dan Prancis memutuskan untuk membiarkan Thailand berdiri sebagai penyangga independen yang merdeka di antara koloni masing-masing di wilayah tersebut.

3. Faktor Pendorong Raja Chulalongkorn untuk Mengadopsi Kebijakan Modernisasi

Ada beberapa faktor utama yang mendasari keputusannya untuk mengadopsi kebijakan antara lain:

a. Ancaman Kolonialisme Eropa

Ancaman kolonialisme merupakan faktor pendorong yang paling penting. Pada ke 19, sebagian besar negara di Asia Tenggara jatuh dibawah kekuasaan kolonial Inggris, Prancis, dan Belanda. Posisi Thailand sebenarnya dikelilingi oleh koloni bangsa Eropa yang menjajah negara-negara tetangga. Inggris menjajah Burma di barat dan Malaya di selatan, sedangkan Prancis menjajah Indocina (Kamboja, Laos, dan Vietnam) di timur dan Belanda di Hindia Belanda. Raja Chulalongkorn menyadari bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan negaranya, Thailand harus menjadi negara yang kuat dan moderen agar tidak dianggap sebagai negara yang kolot dan terbelakang yang mudah dikendalikan oleh penjajah. Chulalongkorn belajar dari negara-negara tetangga seperti China, Burma, dan Vietnam yang gagal menghadapi kekuatan Eropa. Strategi Raja Chulalongkorn, yang memerintah tahun 1868-1910, bisa membuat bangsa Eropa kesulitan menjajah. Raja terbesar di Thailand itu berhasil melakukan upaya mencegah penjajahan dengan mengadopsi sejumlah kebiasaan Eropa. Dia juga melaksanakan diplomasi untuk menjalin hubungan dekat dengan Inggris dan Prancis sehingga meminimalisir peluang dijajah oleh Eropa.

b. Pendidikan Barat dan Keterbukaan Pemikiran

Raja Chulalongkorn sendiri menerima pendidikan Barat yang komprehensif, berbeda dengan raja-raja sebelumnya. Ayahnya raja Mongkut (Rama IV), juga telah memulai insiatif modernisasi dengan membuka hubungan dengan Eropa dan mengizinkan masuknya guru serta penasihat Eropa. Pengalaman dan pengetahuannya tentang dunia Barat memberinya wawasan tentang pentingnya reformasi dan inovasi untuk kemajuan negara Thailand. Raja Mongkut juga mengirim putra-putra bangsawan untuk belajar di luar negeri, yang nantinya membantu dalam proses modernisasi.

c. Kebijakan diplomasi yang cerdas

Raja Chulalongkorn menerapkan Strategi diplomasi yang cerdas dengan menyeimbangkan kepentingan Inggris dan Prancis. Raja

Chulalongkorn menjalin hubungan baik dengan kedua kekuatan kolonial tersebut yaitu dengan melakukan kunjungan ke Eropa dan mempelajari sistem pemerintahan serta teknologi, dengan menjalin hubungan baik ini dan memberikan konsesi kecil seperti wilayah perbatasan, Raja Chulalongkorn mencegah kedua kekuatan tersebut untuk mengintervensi urusan dalam negeri Thailand secara penuh dan pada akhirnya menghindari penjajahan (Sudharmono, 2012).

4. Dampak kebijakan Modernisasi Raja Chulalongkorn Terhadap Transformasi Sosial dan Politik Negara (Siam) Thailand

Kebijakan modernisasi Raja Chulalongkorn (Rama V) yang memerintah Siam (kini Thailand) dari tahun 1868 hingga 1910 membawa dampak transformasional yang mendalam bagi tatanan sosial dan politik negara tersebut. Berhadapan dengan penindasan kolonialisme barat yang kian meningkat di kawasan Asia Tenggara, Raja Chulalongkorn melaksanakan serangkaian reformasi yang ambisius, terinspirasi oleh model Barat namun tetap berusaha mempertahankan kebebasan Siam. Berikut ini dampak-dampak dari kebijakan Raja Chulalongkorn:

a. Dampak Sosial

Reformasi sosial yang dilakukan Raja Chulalongkorn menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat Siam:

- 1) Penghapusan Perbudakan: Salah satu pencapaian terpenting Chulalongkorn adalah penghapusan perbudakan secara bertahap yang dimulai pada tahun 1905. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan hak asasi manusia tetapi juga mengubah struktur sosial masyarakat Siam secara fundamental, membebaskan sejumlah besar tenaga kerja dan memungkinkan mobilitas sosial yang lebih besar.
- 2) Modernisasi Pendidikan: Raja Chulalongkorn menyadari pentingnya pendidikan moderen dalam membangun negara yang kuat dan mandiri. Ia mendirikan sekolah-sekolah bergaya Barat, mengirimkan pelajar ke luar negeri (termasuk putra-putranya sendiri), dan menekankan pentingnya bahasa Thai sebagai bahasa nasional di semua sekolah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan aparatur negara

yang terdidik dan memperkuat identitas nasional.

- 3) Peningkatan Kesehatan Masyarakat: Kebijakan modernisasi juga mencakup upaya peningkatan standar kesehatan dan higienitas. Ini termasuk pengenalan praktik medis moderen dan upaya untuk memperbaiki kesehatan masyarakat.
- 4) Perubahan Gaya Hidup: Beberapa aspek gaya hidup Barat mulai diadopsi, meliputi penggunaan kalender Gregorian/ atau kalender Masehi dan perubahan dalam tata cara makan. Raja Chulalongkorn juga menghapuskan tradisi bersujud di hadapan raja, memperbolehkan rakyat untuk berdiri atau duduk, yang menandakan perubahan dalam hubungan antara penguasa dan rakyat.
- 5) Penguatan Identitas Nasional: Melalui kebijakan bahasa dan pendidikan, serta upaya menyatukan berbagai kelompok etnis di bawah perlindungan "orang Thai", Raja Chulalongkorn berusaha memperkuat rasa persatuan dan identitas nasional. Ini menjadi penting dalam menghadapi ancaman eksternal dan membangun negara yang kohesif.

b. Dampak Politik

Di bidang politik, reformasi Raja Chulalongkorn bertujuan untuk memusatkan kekuasaan, modernisasi administrasi negara, dan penguatan kedaulatan Siam:

- 1) Sentralisasi Pemerintahan: Raja Chulalongkorn melakukan perombakan besar-besaran dalam sistem pemerintahan. Ia menghapuskan sistem penguasa lokal semi-otonom dan menggantinya dengan administrasi terpusat di Bangkok. Pembentukan kementerian-kementerian bergaya Barat pada tahun 1892, dengan mengangkat menteri-menteri yang bertanggung jawab atas berbagai sektor, menjadi fondasi sistem birokrasi moderen Thailand.
- 2) Reformasi Hukum dan Peradilan: Sistem hukum tradisional dibenahi dengan mengadopsi model hukum Barat. Ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, mengoptimalkan peradilan, dan memberikan reputasi negara yang lebih "beradab" di mata

kekuatan Barat, sehingga mengurangi dalih untuk intervensi.

- 3) Modernisasi Militer: Menyadari pentingnya kekuatan militer dalam mempertahankan kedaulatan, Raja Chulalongkorn memodernisasi angkatan bersenjata Siam dengan mengadopsi pelatihan, persenjataan, dan organisasi model Barat. Meskipun tidak sekuat militer Eropa, kekuatan militer yang dimodernisasi ini memberikan raja kemampuan lebih besar untuk mengendalikan wilayahnya dan menghadapi ancaman dari dalam maupun dari luar.
- 4) Diplomasi yang Cerdik: Selain reformasi internal, Raja Chulalongkorn juga pandai dalam menjalankan diplomasi. Ia menjalin hubungan dengan berbagai negara Barat, memanfaatkan persaingan di antara mereka, dan bersedia memberi izin teritorial yang menyakitkan (menyerahkan beberapa wilayah perbatasan) demi mempertahankan kemerdekaan inti kerajaan. Kunjungannya ke Eropa dan pengamatannya terhadap sistem pemerintahan dan kemajuan teknologi di sana turut menginspirasi kebijakan modernisasinya.
- 5) Pembentukan Dasar Negara Moderen: Secara keseluruhan, reformasi politik yang dilakukan Raja Chulalongkorn meletakkan dasar bagi negara Thailand moderen. Upaya pemusatan kekuasaan, pembentukan birokrasi yang efisien, modernisasi hukum, dan penguatan militer berhasil memperkuat posisi Siam dalam menghadapi penindasan kolonial dan membangun negara yang berdaulat di tengah-tengah wilayah yang sebagian besar telah dikuasai oleh kekuatan Eropa (Hall, 1988).

Meskipun reformasi Raja Chulalongkorn sangat transformatif, penting untuk dicatat bahwa proses modernisasi ini juga memiliki kompleksitas dan tantangannya sendiri. Namun, tidak dapat dibantah bahwa kebijakan-kebijakannya memainkan peran penting dalam mencegah Siam jatuh ke tangan kolonialisme Barat secara langsung, serta membentuk dasar sosial dan politik negara Thailand seperti yang dikenal saat ini. Raja Chulalongkorn dikenal sebagai raja yang sangat berpengaruh dalam modernisasi Siam dan berhasil menjaga kemerdekaan negara Siam dari kolonialisme bangsa barat, sehingga ia dikenang sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah

Thailand dan sering disebut sebagai Phra Piya Maharaj (Raja Agung yang Dicintai).

Raja Chulalongkorn wafat pada 23 Oktober 1910 pada usia 57 tahun setelah memerintah selama 42 tahun. Penyebab resmi kematiannya adalah divonis nefropati atau penyakit ginjal. Kematiannya ditangani oleh seluruh rakyat Sam. Tanggal kematiannya, 23 Oktober, hingga kini diperingati sebagai hari libur nasional di Thailand, yang dikenal sebagai Hari Chulalongkorn (Wan Piyamaharaj).

Peninggagalan Raja Chulalongkorn sangatlah besar. Ia dihormati sebagai "Phra Piya Maharaj" (Raja Agung yang Tercinta) karena keberhasilannya dalam memodernisasi Thailand, menghapuskan perbudakan, dan menjaga kedaulatan negara. Reformasi yang dilakukannya meletakkan dasar bagi negara Thailand moderen seperti yang kita kenal saat ini. Patung-patungnya banyak didirikan di seluruh negeri sebagai tanda penghormatan atas jasa-jasanya yang tak ternilai bagi bangsa Thailand. (Sudharmono, 2012).

SIMPULAN

Negara Thailand (Siam) adalah unik di antara negara Asia Tenggara, Siam/Thailand sampai pada zaman modern secara resmi tidak pernah dijajah oleh kekuasaan Eropa. Sedangkan Asia Tenggara lainnya berada di bawah kekuasaan kolonial. Thailand (Siam nama saat itu) tetap tidak ditaklukan. Tidak pernah dibawah dominasi kekuasaan bangsa Barat. Beberapa faktor penyebab negara Thailand tidak dijajah oleh kolonialisme Eropa adalah Thailand sebagai buffer state artinya negara Thailand berada di antara wilayah pengaruh Inggris dan Prancis, sehingga menjadi negara penyangga yang memicu persaingan dan mencegah salah satu negara Barat untuk menguasai seluruh wilayah, faktor lain yang tidak kalah penting dari keberhasilan yang luar biasa ini terletak pada tujuan dan kepemimpinan seorang raja yang progresif dan strategis yaitu Raja Chulalongkorn, yang juga dikenal dengan nama anumerta Rama V. Chulalongkorn dengan nama lengkap Phra Bat Somdet Phra Poramintharamaha Chulalongkorn Phara Chunla Chom Klao Chao Yu Hua (rama V) lebih dikenal raja Culalongkorn, lahir pada 20 September 1853, di istana Agung Phara Nakhon, Siam. Pangeran Chulalongkorn adalah putra tertua Raja Mongkut (Rama IV) dan Ratu

Debsirindra yang dikenal sebagai putri Ramphoei Sriwong, dari dinasti Chakri.

Raja Chulalongkorn secara resmi mengambil alih kendali penuh pemerintahan pada tahun 1873 setelah mencapai usia 20 tahun dengan penobatan keduanya (coronation). Meskipun demikian pada awal masa kekuasaan penuh Chulalongkorn masih menghadapi tantangan dari fraksi-fraksi konservatif istana. Baru pada pertengahan tahun 1880-an ia mulai secara bertahap menempatkan adminisator yang kompeten dan terpercaya, yang memungkinkannya untuk melaksanakan reformasi besar-besaran secara lebih efektif.

Puncaknya adalah pembentukan 12 kementerian. Faktor-faktor yang pendorong Raja Chulalongkorn mengadopsi kebijakan modernisasi adalah Ancaman Kolonialisme Eropa, Pendidikan Barat dan Keterbukaan Pemikiran dan kebijakan diplomasi yang cerdas. Kebijakan modernisasi Raja Chulalongkorn (Rama V) yang memerintah Siam (kini Thailand) dari tahun 1868 hingga 1910 (Fauziah et al., 2025) membawa dampak transformasional yang mendalam bagi tatanan sosial dan politik negara Thailand. Dampak sosial meliputi penghapusan perbudakan, modernisasi pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat, perubahan gaya hidup, penguatan identitas nasional, dampak politik meliputi sentralisasi pemerintahan, reformasi hukum dan peradilan, modernisasi militer, pembentukan dasar moderen. Raja Chulalongkorn wafat pada 23 Oktober 1910 pada usia 57 tahun setelah memerintah selama 42 tahun. Peninggagalan Raja Chulalongkorn sangatlah besar. Ia dihormati sebagai "Phra Piya Maharaj" (Raja Agung yang Tercinta) karena keberhasilannya dalam memodernisasi Thailand, menghapuskan perbudakan, dan menjaga kedaulatan negara. Reformasi yang dilakukannya meletakkan dasar bagi negara Thailand moderen seperti yang kita kenal saat ini.

PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Segalah Puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas ridhonya artikel ini dapat terwujud. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama proses

penyusunan artikel ini. Tanpa bantuan dari berbagai pihak artikel ini tidak dapat terwujud.

Peneliti menyatakan bahwa artikel ini disusun secara mandiri dan merupakan kerja keras hasil pemikiran. Selama proses penulisan peneliti telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari segala bentuk potensi konflik kepentingan. Semua sumber yang digunakan telah dicantumkan dengan jelas, dan setiap saran dari pihak lain telah peneliti filter dan adaptasi sesuai dengan objektivitas dan tujuan penulisan.

REFERENSI

- Abdul Rahman Sholeh. (2005) . (Abdul Rahman Sholeh, 2005). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- D.G. E Hall. (1988). Sejarah Asia Tenggara. Surabaya: Usaha Nasional.
- M.C. Ricklef dkk. (2013). Sejarah Asia Tenggara Dari Masa Prasejarah sampai Kontemporer. Jawa Barat: Komunitas Bambu
- Mahmud. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Pustaka Setia
- Rahma Fauziah dkk. (2025) . Dari Monarki Absolut Ke Pemerintahan Konstitusional: Jejak Modernisasi Thailand. Jurnal Integrasi Pengetahuan Disiplin. Volume 6. Nomor 1 (138-143)
<https://ijurnal.com/1/index.php/jipd/article/view/366>
- Sudharmono. (2012). Sejarah Asia Tenggara Modern (Dari Penjajahan ke Merdeka). Yogyakarta: Ombak